Huma: Jurnal Sosiologi
ISSN 2988-5795

Volume 4, Nomor 2 (2025)

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERABAIKAN: KELEMAHAN STRATEGI MITIGASI BENCANA BPBD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Tiara Selvia Perdana[1], Ismar Hamid[1]
[1]*Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

Corresponding author:
Tiara Selvia Perdana
tiaraselviaperdana@gmail.com

Keywords:	***DOI:***	***Article History:***
Disaster mitigation; community empowerment; resource mobilization	https://doi.org/10.20527/h-js.v4i2.499	*Received: March 2, 2025* *Accepted: April 24, 2025*

ABSTRACT

The diverse social and ecological conditions of Hulu Sungai Tengah (HST) Regency require BPBD to apply a more innovative strategic approach in disaster mitigation. This research aims to find out the concrete steps of BPBD HST in reducing the level of vulnerability, the level of vulnerability, and the strategic approach applied in increasing community capacity in disaster management in HST Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP). The results showed that BPBD HST has implemented various strategies to reduce the level of disaster vulnerability and community vulnerability, as well as increase community and regional capacity, namely: (1) utilizing the ArcGIS application for mapping disaster-prone areas and installing Early Warning Systems (EWS) in strategic locations; (2) paying extra attention to vulnerable groups, such as children, pregnant women, disabilities, and the elderly through the Disaster Resilient Village (Destana) program, as well as specific needs-based assistance during disasters; and (3) increasing community capacity through training in preparing Disaster Management Plan documents, as well as improving technical skills, such as self-evacuation mechanisms, first aid to victims, use of rubber boats and others. This research reveals that the role of BPBD HST in mobilizing resources for disaster mitigation by reducing vulnerability and vulnerability, and increasing capacity through community empowerment to achieve a more ideal strategy in disaster management. This research suggests BPBD HST to further optimize the Destana program by emphasizing the sustainable impact on the HST community, such as organizing routine training, periodic disaster simulations, as well as ongoing mentoring that involves active participation by the local community.

ABSTRAK

Keberagaman kondisi sosial dan ekologis Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengharuskan BPBD menerapkan pendekatan strategis yang lebih inovatif dalam mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah konkrit BPBD HST dalam mengurangi tingkat kerawanan, tingkat kerentanan, dan pendekatan strategis yang diterapkan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten HST. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD HST telah melaksanakan berbagai strategi untuk mengurangi tingkat kerawanan bencana dan kerentanan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan daerah, yakni: (1) pemanfaatan aplikasi ArcGIS untuk pemetaan wilayah rawan bencana serta pemasangan *Early Warning System* (EWS) di lokasi strategis; (2) memberikan perhatian ekstra terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, disabilitas, dan lansia melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana), serta bantuan berbasis kebutuhan spesifik saat bencana; dan (3) peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, serta peningkatan keterampilan teknis, seperti mekanisme evakuasi mandiri, pertolongan pertama pada korban, penggunaan perahu karet dan lain-lain. Penelitian ini mengungkap bahwa peran BPBD HST dalam memobilisasi sumber daya untuk mitigasi bencana dengan mengurangi kerawanan dan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas melalui pemberdayaan masyarakat guna mencapai strategi yang lebih ideal dalam penanggulangan bencana.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

Penelitian ini menyarankan BPBD HST untuk lebih mengoptimalkan program Destana dengan menekankan pada dampak berkelanjutan bagi masyarakat HST, seperti menyelenggarakan pelatihan rutin, simulasi bencana berkala, serta pendampingan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif oleh masyarakat setempat.

How to Cite:
Perdana, T. S., & Hamid, I. (2025). Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terabaikan: Kelemahan Strategi Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Huma: Jurnal Sosiologi, 4*(2), 118-130. https://doi.org/10.20527/h-js.v4i2.499

This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memiliki kondisi geografis yang beragam, mencakup kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus (Maulana et al., 2024). Keberagaman ini menyebabkan HST memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Risiko bencana yang tinggi ini menjadikan HST sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, penting untuk memahami dinamika kebencanaan di wilayah ini guna merancang strategi yang lebih efektif dalam mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (Nardin, 2019).

Mitigasi bencana menjadi langkah krusial dalam upaya penanggulangan bencana, sebab hal ini memiliki tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko korban jiwa serta kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Fokus utama mitigasi harus dimulai dari tahap pra-bencana, yaitu sebelum bencana terjadi, baik dalam konteks bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana akibat aktivitas manusia (*man-made disaster*) (Wekke, 2021). Pada praktiknya, mitigasi bencana melibatkan berbagai strategi untuk meminimalkan dampak negatif bencana dengan tujuan mengurangi atau menghapus kerugian serta korban jiwa (Nurillah et al., 2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam mensinkronkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan efektivitas mitigasi bencana. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5b, yang menetapkan bahwa tanggung jawab penanggulangan bencana berada di tangan pemerintah pusat dan daerah (Nardin, 2019). Namun, efektivitas peran BPBD dalam memobilisasi sumber daya serta implementasi strategi mitigasi bencana masih menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian (Widayati, 2020), menyatakan bahwa keberadaan BPBD dalam menanggulangi bencana alam, umumnya menyesuaikan karakteristik tiap daerah, seperti BPBD Kota Solo yang menggunakan pendekatan berbeda sesuai potensi bencana lokalnya. Selanjutnya, penelitian (Syarifah et al., 2020) mengungkapkan bahwa BPBD Kota Balikpapan masih terbilang kurang dalam pelatihan dan sosialisasi dari BPBD Kota Balikpapan terhadap masyarakatnya, hal ini berdampak pada kesiapsiagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana yang berada di taraf rendah. Kemudian, penelitian (Hadi et al., 2019) mengungkapkan bahwa tingginya angka korban jiwa akibat bencana alam, yakni gempa bumi, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat akan mitigasi bencana berdampak pada penanggulangan bencana alam. Berdasarkan apa yang

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

telah dipaparkan dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa ketika satu elemen dari sumber daya tidak dioptimalkan, seperti infrastruktur yang tidak memadai dan keterlibatan masyarakat yang rendah, maka proses penanggulangan bencana dapat terhambat.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji salah satu dari tiga aspek penting dalam mitigasi bencana. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji ketiga aspek tersebut dalam satu penelitian. Padahal, strategi mitigasi yang mempertimbangkan ketiga aspek ini secara terintegrasi dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana suatu wilayah mampu bertahan atau beradaptasi terhadap ancaman bencana, baik dari kesiapan fisik daerah maupun ketahanan sosial masyarakatnya.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memperkuat pemahaman mengenai strategi mitigasi bencana dalam perspektif sosiologis, yang mencakup tingkat kerawanan, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah maupun masyarakat yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan pendekatan yang lebih holistik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dalam menilai kesiapan wilayah, tidak hanya dari ketahanan fisik daerah, tetapi juga dari aspek sosial masyarakatnya.

Penanganan bencana tidak bisa hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, material, atau ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek tingkat bahaya, kerentanan sosial, lingkungan, budaya, dan infrastruktur, serta kapasitas daerah dan masyarakat. Penting untuk menganalisis bagaimana BPBD dalam mengintervensi keseluruhan aspek dalam mitigasi bencana, mulai dari partisipasi masyarakat, peran lembaga lokal, dan pengaruh struktur sosial terhadap keberhasilan strategi tersebut. Kajian ini menyoroti upaya BPBD dalam mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko bencana di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlandaskan teori mobilisasi sumber daya dari (Sukmana, 2016), serta pendekatan strategis pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Hanna & Robinson, 1994; Hamid & Meilinda, 2023).

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam lingkup kajian sosiologi bencana. Hasil penelitian ini juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terkhusus kajian sosiologi mengenai mitigasi bencana. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan efektivitas program mitigasi bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas dan fenomena sosial secara mendalam yang ada di masyarakat (Sugiyono, 2022). Dalam konteks ini, strategi mitigasi bencana berperan sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yakni pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendalami secara intensif suatu program, kejadian, proses, atau aktivitas tertentu yang melibatkan satu atau lebih individu (Larasati & Hamid, 2024). Subjek penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Data didapatkan dari sumber primer (situasi sosial) dan sekunder (literatur). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan cara mengamati program

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian wawancara dilakukan untuk menggali atau melakukan pendalaman informasi yang didapatkan dari hasil observasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel untuk mengeksplorasi pandangan informan secara mendalam. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling,* yakni ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau data dan informasi yang diharapkan dari para informan. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 12 orang, yang terdiri dari 5 (lima) anggota BPBD HST, 2 (dua) perwakilan pemerintah desa, dan 5 (lima) masyarakat yang tinggal di desa lokasi program BPPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah diimplementasikan. Teknik analisis data menggunakan *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP), yang terdiri dari catatan lapangan, transkrip, *coding,* kategorisasi, tema, dan memos (Rofiah & Bungin, 2024). Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Alam dan Potret Bencana Alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memiliki kondisi geografis yang beragam, mencakup kawasan rawa, dataran rendah, dan Pegunungan Meratus, yang berkontribusi pada tingginya risiko bencana di wilayah ini. Kawasan rawa, dengan kapasitas *drainase* alami yang terbatas, rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan. Konversi lahan rawa menjadi area pertanian atau permukiman memperburuk risiko ini dengan merusak ekosistem penyangga (Izhar & Susilawati, 2024). Dataran rendah, terutama di sekitar Barabai (ibukota kabupaten), juga memiliki risiko banjir tinggi akibat curah hujan ekstrem yang menyebabkan sungai meluap. Faktor lain, seperti kepadatan permukiman di bantaran sungai dan *drainase* yang tidak optimal, semakin meningkatkan kerentanannya (Aulia & Meiwanda, 2022). Sementara itu, Pegunungan Meratus yang mencakup wilayah Kecamatan Hantakan dan Kecamatan Batang Alai Timur menghadapi ancaman tanah longsor. Perubahan iklim yang memicu hujan ekstrem memperbesar potensi longsor di daerah ini (Maulana et al., 2024).

Di berbagai wilayah HST, keragaman geografis mempengaruhi tingkat kerawanan bencana. Desa Jaranih di Kecamatan Pandawan, misalnya, terdampak banjir akibat aliran air dari Pegunungan Meratus dan sedimentasi Sungai Barabai. Di kawasan pegunungan, peningkatan curah hujan memperlihatkan dampak nyata terhadap risiko longsor di Hantakan dan Batang Alai Timur. Kajian Risiko Bencana (KRB) HST tahun 2023, melaporkan bahwa sejumlah area berada dalam kategori rawan terhadap berbagai jenis bencana, di antaranya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan campur tangan oknum-oknum tak bertanggungjawab (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2023).

Bencana banjir di wilayah HST bukan hal asing lagi bagi masyarakat setempat. Laporan Jitu Pasna tahun 2021 mengungkapkan bahwa dampak yang meluas setiap tahun (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2021). Termasuk bencana besar pada 26 Desember 2024 yang merendam ribuan rumah di Kecamatan Barabai, Pandawan, dan Batu Benawa. Setahun sebelumnya, banjir besar juga melanda lima kecamatan, dengan Batu Benawa sebagai wilayah terdampak paling parah. Sejarah bencana menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga akibat perubahan lingkungan dan pola cuaca yang semakin ekstrem. Masyarakat, terutama petani di Desa Jaranih,

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

mengalami kerugian besar akibat gagal panen. Meski mendapat bantuan pemerintah, mereka tetap pasrah karena solusi yang ada belum cukup mengatasi dampak bencana. Beberapa warga beradaptasi dengan membangun rumah tingkat dua, tetapi upaya ini masih bersifat individu dan belum memberikan dampak kolektif.

Selain banjir, HST juga menghadapi tanah longsor yang berulang, seperti di Kecamatan Hantakan dan Kecamatan Batang Alai Timur, yang menutup akses jalan dan mengisolasi warga. Kekeringan menjadi ancaman lain, terutama di musim kemarau yang panjang, menyebabkan minimnya air bersih dan kebakaran lahan akibat metode pembukaan lahan dengan pembakaran. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan mitigasi bencana di HST tidak cukup hanya dengan bantuan sementara, tetapi harus mencakup langkah-langkah konkret yang lebih strategis dengan kesiapsiagaan masyarakat yang matang terhadap bencana yang ada. Tanpa langkah konkret, siklus bencana dan kerugian akan terus berulang.

2. Program Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berlandaskan dengan prioritas fokus utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dalam memaksimalkan upaya strategi mitigasi bencana yang di antaranya berupa: (1) peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana); (2) peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC); dan (3) pembentukan Keluarga Tangguh Bencana. Demi memaksimalkan upaya strategi mitigasi bencana pada wilayah HST, BPBD menindaklanjuti strategi tersebut melalui tiga upaya program, yakni program penurunan tingkat kerawanan bencana alam, program penurunan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, dan program peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana alam.

a. Program penurunan tingkat kerawanan bencana alam

BPBD HST telah melaksanakan program penurunan tingkat kerawanan bencana berlandaskan laporan Rencana Kontinjensi Bencana (RKB), Rancangan Penanggulangan Bencana (RPB), serta Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2023). Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak bencana melalui pemetaan dan identifikasi risiko di wilayah HST, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, tanah longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya akibat kondisi geografisnya. Untuk memastikan efektivitas program ini, BPBD HST menggunakan pendekatan *social mapping* dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat sipil.

Seperti beberapa desa yang telah diidentifikasi rawannya bencana oleh BPBD HST, diantaranya Desa Haruyan di Kecamatan Haruyan dan Desa Alat di Kecamatan Hantakan, kawasan ini diketahui rawan terkena banjir tahunan, terutama menjelang akhir tahun yang kerap diiringi banjir bandang. Penduduk di desa-desa tersebut memiliki pemahaman mengenai pola bencana yang terjadi, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi dan menyepakati data historis bencana di wilayah tersebut. Proses ini tidak hanya mengandalkan informasi lokal, tetapi juga mengintegrasikan analisis yang lebih luas mencakup aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Gambar 1. Kondisi Desa Haruyan saat terdampak banjir bandang
(Sumber: Rizaldi & Bastara, 2024)

Data yang diperoleh dari lapangan oleh BPBD HST, kemudian dikombinasikan dengan catatan historis kejadian bencana yang tersedia pada laporan-laporan BPBD HST untuk menghasilkan peta kerawanan yang akurat dan relevan. Peta ini diharapkan menjadi alat penting dalam memitigasi risiko bencana dan mendukung perencanaan berbasis lokasi setempat. Setelah melewati proses pemetaan, BPBD HST melakukan identifikasi risiko dengan membagi wilayah berdasarkan tingkat kerawanan, mulai dari zona risiko rendah hingga tinggi. Proses ini mencakup penilaian infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum dan kapasitas multibahaya wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemetaan wilayah yang dilakukan BPBD HST kemudian ditambahkan pada laporan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

> *"…Peta dibuat menggunakan aplikasi Archgis, menyesuaikan dengan aplikasi inarisk BNPB. BPBD HST dan konsultan yang membuatnya setelah dilakukan asistensi langsung dengan BNPB…" (Informan Amir Murthado (Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah), 2024)*

Pengkajian oleh seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi tak hanya berhenti pada BPBD HST saja, tetapi adanya keterlibatan langsung dari BPBD Kalimantan Selatan sebagai konsultan. Adapun, risiko yang diidentifikasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup risiko sosial, seperti potensi kerentanan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas (Siregar & Wibowo, 2019).

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

Gambar 2. Tampilan EWS di depan kantor DPRD HST
(Sumber: Instagram @bpbdhst_)

Selain itu, untuk mengurangi tingkat kerawanan bencana BPBD HST mengupayakan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di beberapa lokasi strategis yang rawan terhadap banjir. Adapun titik pemasangan EWS meliputi Desa Haruyan Dayak, tepat di bantaran sungainya, Desa Alat sekitar 100 meter dari Kantor Kepala Desa Haruyan Dayak, dan di Kantor DPRD HST. Selain itu, BPBD HST juga menyediakan alarm kebencanaan yang dikelola langsung oleh otoritas BPBD untuk memberikan peringatan jika terdeteksi peningkatan debit air secara terus-menerus. EWS merupakan suatu alat peringatan dini terhadap bencana banjir tetapi juga menjadi elemen penting dalam sistem peringatan bencana terpadu, yang melibatkan pengawasan aktif dari BPBD untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan akurat (Adyatma et al., 2022).

b. Program penurunan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam

Program penurunan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berfokus pada peningkatan kapasitas komunitas melalui Desa Tangguh Bencana (Destana). Salah satu aspek utama dalam program ini adalah perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi risiko bencana, seperti anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (Siregar & Wibowo, 2019).

Menurut BPBD HST, Destana hadir guna memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi situasi darurat. Informan Muhammad Noor Irfansyah, Staf Administrasi Seksi Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD HST, menekankan bahwa setiap kelompok rentan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok.

1) Anak-anak

Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan mereka dalam melindungi diri serta kurangnya pemahaman terhadap

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

bahaya yang mengancam. Mereka lebih berisiko mengalami kekurangan gizi, penyakit, trauma psikologis, dan bahkan terpisah dari keluarganya (Siregar & Wibowo, 2019). Menyadari kerentanan ini, BPBD HST mengambil langkah khusus untuk memastikan keselamatan anak-anak selama proses evakuasi. Salah satunya dengan menyediakan perahu khusus untuk evakuasi, serta bantuan kebutuhan dasar seperti popok bayi dan pakaian yang layak dari donasi eksternal dan internal.

2) *Perempuan (ibu hamil dan menyusui)*

Ibu hamil dan menyusui memiliki tingkat kerentanan tinggi pascabencana karena memerlukan waktu pemulihan lebih lama dan menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar, seperti komplikasi kehamilan dan gangguan produksi ASI. Mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mereka mendapat perhatian khusus dalam upaya mitigasi bencana. Sebagai bentuk implementasi, BPBD HST telah menyediakan perahu evakuasi khusus untuk memastikan keamanan mereka selama proses evakuasi. Selain itu, bantuan seperti susu ibu hamil dan pakaian yang nyaman juga disediakan untuk memudahkan aktivitas mereka di lokasi pengungsian.

3) *Penyandang disabilitas*

Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kelompok yang tidak mandiri dan bergantung pada bantuan orang lain, sehingga dalam situasi bencana mereka lebih berisiko mengalami kesulitan mobilitas, komunikasi, dan akses terhadap fasilitas dasar (Siregar & Wibowo, 2019). Oleh karena itu, program mitigasi bencana harus memastikan bahwa fasilitas pengungsian, jalur evakuasi, serta akses terhadap informasi dapat diakses oleh mereka. Sebagai upaya konkret, BPBD HST telah mengoptimalkan penanganan penyandang disabilitas dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses evakuasi, termasuk menyediakan titik-titik penjemputan yang strategis, guna lebih mengefektifkan penanganannya.

4) *Lanjut usia (lansia)*

Lansia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Banyak lansia yang tinggal sendiri, sehingga risiko mereka dalam menghadapi bencana semakin besar. Ketika harus mengungsi, mereka sering mengalami ketidaknyamanan karena kehilangan tempat tinggal dan komunitasnya. Menurut informan Fitriadinoor, Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik BPBD HST mengungkapkan BPBD HST menyediakan perahu evakuasi khusus serta bantuan seperti vitamin dan popok dewasa.

> *"…Biasanya kami (BPBD HST) melakukan Sosialisasi Mitigasi Bencana hanya pada Destana, sebab desa yang menjadi Destana adalah wilayah yang rawan terhadap bencana. Dalam mengantisipasi tak semua elemen masyarakat yang berpartisipasi pada sosialisasi yang diselenggarakan, maka kami melakukan sosialisasi juga melalui Instagram @bpbdhst_ …" (Informan Fitriadinoor (Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah), 2024)*

Destana memberikan wadah bagi masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan strategi mitigasi bencana. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan BPBD HST. Untuk mengatasi hal ini, BPBD HST juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram (@bpbdhst_) untuk menyebarluaskan informasi terkait mitigasi bencana. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peralatan kesiapsiagaan bencana, seperti tas siaga bencana. Misalnya, dalam kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana di Desa Hinas Kanan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Sosiologi FISIP ULM bersama BPBD HST pada 2 September 2024, ditemukan bahwa banyak warga baru mengetahui tentang keberadaan dan pentingnya tas siaga bencana (Hasanah et al., 2024).

c. Program Peningkatan Kapasitas dalam Menghadapi Bencana Alam

Program Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu inisiatif utama dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Destana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi, menghadapi ancaman bencana, serta cepat pulih dari dampak yang ditimbulkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana (Yarni et al., 2023). Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), BPBD setempat berfokus pada peningkatan kapasitas Destana, pembentukan Keluarga Tangguh Bencana (Katana), serta pelatihan bagi Tim Reaksi Cepat. Upaya ini mencakup pelatihan bagi masyarakat untuk mengenali potensi ancaman, memetakan risiko, dan mengorganisasi sumber daya lokal guna meningkatkan efektivitas mitigasi bencana.

Dalam implementasinya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program Destana bervariasi di setiap desa. Seperti, di Desa Haruyan, masyarakat menunjukkan partisipasi aktif, seperti dalam kegiatan gotong royong membersihkan sungai yang menjadi bagian dari agenda tahunan Destana. Sebaliknya, di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, program Destana belum berjalan optimal sejak terbentuk pada Agustus 2024. Hingga kini, belum ada aktivitas khusus selain sosialisasi oleh BPBD HST, salah satunya karena keberadaan komunitas lain seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), yang lebih berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pengalaman BPBD HST dalam memfasilitasi berbagai pelatihan, seperti penggunaan perahu karet, menunjukkan bahwa efektivitas program Destana sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pihak terkait. Desa dengan inisiatif tinggi, seperti Haruyan dan Jaranih, cenderung lebih siap menghadapi bencana dibandingkan desa yang hanya mengandalkan intervensi eksternal. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dan sinergi dengan BPBD menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketangguhan desa terhadap bencana.

3. Pergerakan di Tengah Keterbatasan Sumber Daya BPBD HST

a. Mobilisasi sumber daya

Temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa teori mobilisasi sumber daya, baik manusia, material, kultural, moral, maupun organisasi-sosial, menjadi elemen krusial dalam keberhasilan mitigasi bencana (Sukmana, 2016). Dalam konteks Badan Pennaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dalam penanggulangan bencananya, BPBD HST membentuk wadah optimalisasi sumber daya

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS

organisasi-sosial yang disengaja melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) yang belum berjalan. Selain itu, BPBD HST pun menjalin kerjasama dengan organisasi sosial yang ada pada wilayah HST, yakni Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) disebut sebagai organisasi sosial sepadan.

1) *Sumber daya organisasi sosial*

Optimalisasi sumber daya organisasi sosial terlihat dalam pemanfaatan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar), yang menunjukkan pentingnya kolaborasi antar-*stakeholder* untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam konteks ini, BPBD HST memobilisasikan program Destana sebagai organisasi sosial disengaja, sedangkan Balakar sebagai organisasi sosial yang sepadan.

2) *Sumber daya manusia*

BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi keterbatasan SDM akibat statusnya sebagai BPBD tipe B., yang berdampak pada jumlah personel yang lebih sedikit dibandingkan BPBD tipe A. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD HST, yang memerlukan dukungan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dengan segi kuantitas yang terbatas. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kecepatan respons terhadap bencana, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan strategi mitigasi. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD HST berupaya meningkatkan kualitas kapasitas personelnya melalui pelatihan teknis (Bimtek) di setiap seksi, guna memastikan bahwa meskipun jumlah SDM terbatas, kualitas keterampilan mereka tetap memadai.

3) *Sumber daya kultural*

Mitigasi bencana bergantung pada pemanfaatan kearifan lokal masyarakat, seperti di Desa Panggang Marak dan Desa Haruyan, di mana pengalaman kolektif membentuk strategi adaptasi. BPBD HST mengintegrasikan pendekatan budaya dalam sosialisasi, meski menghadapi tantangan dalam mengubah kebiasaan berisiko, seperti menetap di kawasan sempadan sungai. Untuk meningkatkan efektivitas, BPBD HST memanfaatkan program Destana serta media sosial, yakni Instagram @bpbdhst_ dalam penyebaran informasi.

4) *Sumber daya moral*

Dukungan eksternal berperan dalam memperkuat legitimasi dan motivasi BPBD serta masyarakat terdampak. Bentuk dukungan ini meliputi, diantaranya; 1) bantuan logistik dan dana dari instansi pemerintah dan organisasi masyarakat; 2) peran relawan dan organisasi sukarela seperti TNI-POLRI, relawan gabungan HST, dan Balakar, yang mempercepat respons bencana; 3) kolaborasi akademik, seperti kerja sama BPBD dengan FISIP ULM dalam pembentukan Destana di Desa Hinas Kanan, guna memperkuat kesiapsiagaan berbasis penelitian.

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

5) Sumber daya material

BPBD HST menghadapi keterbatasan signifikan dalam sumber daya material, terutama dalam anggaran dan peralatan operasional. Sebagai BPBD tipe B, alokasi dana yang diterima dari APBD maupun bantuan vertikal dari BPBD Provinsi dan BNPB masih terbatas, sehingga mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Data menunjukkan bahwa dari 285 unit perlengkapan yang dikelola, sebagian mengalami kerusakan atau kondisi kurang layak, berpotensi menghambat efektivitas mitigasi dan respons bencana.

Meskipun berstatus tipe B dengan segala keterbatasannya, BPBD HST tetap mengoptimalkan distribusi bantuan dan respons bencana melalui sinergi dengan berbagai pihak eksternal. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, serta relawan menjadi strategi utama dalam memperkuat daya tanggap terhadap bencana, sekaligus membuktikan bahwa efektivitas tidak selalu bergantung pada status kelembagaan, melainkan pada kemampuan mengelola sumber daya yang ada secara strategis dan adaptif.

b. Strategi mitigasi bencana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tinjauan teori pemberdayaan masyarakat

Secara keseluruhan, strategi mitigasi BPBD HST menekankan kolaborasi, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan kearifan lokal, serta dukungan eksternal, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan struktural dan sumber daya. Pendekatan strategis pemberdayaan masyarakat merupakan kunci penting dalam konteks penanggulangan bencana. (Hanna & Robinson, 1994; Hamid & Meilinda, 2023), mengemukakan bahwa terdapat tiga strategi pemberdayaan masyarakat pada praktik perubahan sosial. Strategi tradisional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi *direct-action*, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformatif, menekankan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengiden-tifikasian kepentingan diri sendiri. Menurut (Sari & Hamid, 2023), idealnya program pemberdayaan masyarakat menerapkan strategi transformatif yang menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

Meninjau dari upaya BPBD HST dalam strategi mitigasi bencananya melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) telah menerapkan pendekatan *direct-action*, di mana mereka berperan sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan dan pendampingan awal kepada masyarakat. Namun, setelah tahap fasilitasi selesai, keberlanjutan program sepenuhnya bergantung pada desa masing-masing tanpa intervensi jangka panjang dari BPBD. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *direct-action* (Hanna & Robinson, 1994; Hamid & Meilinda, 2023), yang menekankan dominasi kepentingan bersama dalam proses pemberdayaan. Destana, sebagai program yang lahir dari BNPB dan diimplementasikan oleh BPBD berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012, bertujuan menciptakan desa yang mandiri dalam menghadapi bencana. Meskipun BPBD HST memberikan dukungan awal, keberlanjutan program bergantung pada kesiapan desa, sebagaimana terlihat pada Desa Haruyan yang berhasil mengembangkan program ini,

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

sementara Desa Panggang Marak mengalami stagnasi akibat rendahnya kesadaran dan sumber daya.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi mitigasi BPBD HST masih terbatas pada fasilitasi awal tanpa pendampingan jangka panjang, membuat ketangguhan masyarakat tidak merata, terutama di desa dengan kapasitas rendah. Pendekatan berbasis kearifan lokal yang diandalkan BPBD HST juga berisiko jika tidak didukung oleh institusi secara berkelanjutan. Dengan adanya keterbatasan anggaran yang dipengaruhi oleh status BPBD sebagai institusi tipe B semakin membatasi mobilisasi sumber daya, meskipun respons terhadap banjir bandang 2021 menunjukkan adaptasi yang baik. Namun, tanpa kebijakan komprehensif, program Destana berisiko menjadi intervensi sesaat, bukan solusi jangka panjang dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Penelitian ini menyarankan BPBD HST untuk lebih mengoptimalkan program Destana dengan memikirkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat HST, seperti menyelenggarakan pelatihan rutin, simulasi bencana berkala, serta pendampingan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif oleh masyarakat setempat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini, yakni: (1) BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah; (2) Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

REFERENSI

Adyatma, S., Arisanty, D., Rahman, A. M., & Setiawan, F. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Alat Early Warning System (EWS) Sederhana Untuk Meningkatkan Pemahaman Kesiapsiagaan Bencana Banjir Rob. *Carmin: Journal of Community Service*, *2*(2), 59–68. https://doi.org/10.59329/carmin.v2i2.69

Aulia, C., & Meiwanda, G. (2022). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Bada Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat. *Journal of Research and Development on Public Policy*, *1*(3), 35–44. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2021). *Jitu Pasna Tahun 2021*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2023). *Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2023*.

Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, *3*(1), 30–40. https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476

Hamid, I., & Meilinda, S. R. (2023). Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Livelihood Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *8*(1), 1–23. https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.13585

Hanna, M. G., & Robinson, B. (1994). *Strategies for Community Empowerment: Direct-Action and Transformative Approaches to Social Change Practice*. New York: Mellen

Copyright © 2025 by The Authors

OPEN ACCESS

Press.
Hasanah, N., Zulaikha, S., Rahmadianty, P., Safira, A., Marlina, Utari, S. P., Puspita, D., Janah, M., Perdana, T. S., Salam, I. A., Rijal, M. S., & Hauzan, M. R. F. (2024). Membangun Desa Hinas Kanan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana). *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 174–187. https://doi.org/10.20527/hb.v2i2.430
Izhar, L., & Susilawati, A. (2024). *Monitoring PAT di Hulu Sungai Tengah: BSIP Lahan Rawa Dampingi Tim Ahli Menteri Pertanian*. Berita BSIP Lahan Rawa.
Larasati, A., & Hamid, I. (2024). Pemikiran Ekologis pada Petani Kopi dalam Kawasan Hutan Konservasi di Desa Tiwingan Baru Kabupaten Banjar. *Huma: Jurnal Sosiologi*, *3*(2), 132–144. https://doi.org/10.20527/h-js.v3i2.215
Maulana, I., Suryaningrum, N., & Fauziyah, F. (2024). *Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2024* (E. Rahmadani, M. Q. Bimantara, & I. Maulana (eds.); Issue 21). Kabupaten Hulu Sungai Tengah: BPS kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *8*(3), 88–93. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3
Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 334–350. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613
Rizaldi, A., & Bastara, M. (2024). *Hujan Deras, Banjir Setinggi Paha Rendam Desa Haruyan HST*. Poros Kalimantan.
Rofiah, C., & Bungin, B. (2024). Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur. *Develop*, *8*(1), 1–13. https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319
Sari, C. R., & Hamid, I. (2023). Bias Cahaya: Paradoks Pemberdayaan Masyarakat Pada Difabel Netra di Kota Banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, *2*(3), 213–222. https://doi.org/10.20527/h-js.v2i3.104
Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, *10*(1), 30–38. https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/view/129
Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., Ketut, I. D., & Widana, K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *7*(2), 398–407. http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i2.2020.398-407
Wekke, I. S. (2021). *Mitigasi Bencana* (Abdul (ed.); 1st ed.). Indramayu: Penerbit Adab.
Widayati, R. S. (2020). Studi Kajian Peran BPBD dan Aisyiyah Disaster Action dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Surakarta. *Gaster*, *18*(1), 108–118. https://doi.org/10.30787/gaster.v18i1.549
Yarni, L., Juita, E., & Zuriyani, E. (2023). Efektivitas Program Terhadap Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Padang Pariaman. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(9), 4323–4330. http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4323-4330

Copyright © 2025 by The Authors
OPEN ACCESS